

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan memiliki keberadaan yang begitu fundamental bagi suatu bangsa. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan bakat, dan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa dan negara yang bermartabat. Dari penjabaran tersebut, apabila kita amati sistem pendidikan Indonesia saat ini, ada begitu banyak perubahan yang dilalui. Perubahan yang ada dimulai dari perubahan kurikulum, pengembangan sistem proses belajar mengajar, pemanfaatan sarana prasarana bagi sistem pendidikan, bahkan hingga adanya peningkatan mutu guru sebagai seorang pendidik.

Pendidikan dapat diwujudkan melalui proses belajar mengajar dengan tujuan mencerdaskan kehidupan manusia (Mubai, dkk., 2020; Qolbi dan Hamami, 2019). Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, tentu ada langkah-langkah tertentu yang dapat dijalankan oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri. Maka rencana dan aturan dalam mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan sangat diperlukan (Astawa, 2019). Perencanaan dan aturan dalam sebuah pendidikan dapat diwujudkan ke dalam sebuah kurikulum (Mubai, dkk., 2021).

Kurikulum adalah rencana yang terperinci yang digunakan saat pelaksanaan pendidikan sebagai panduan untuk mencapai tujuannya. Sejalan dengan itu, Adipratama, dkk. (2018) menyatakan bahwa kurikulum dapat pula memberikan pengalaman yang nantinya akan diarungi oleh peserta didik di dalam pelaksanaan pendidikan sehingga kurikulum ke depannya akan dapat berbentuk sejumlah mata pelajaran. Perencanaan yang ada dalam kurikulum akan mempermudah pendidik untuk menyusun strategi dan perangkat pembelajaran lainnya.

Kurikulum di Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali. Mulai dari rentjana pelajaran 1947, yang mengalami penyempurnaan menjadi Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Rentjana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975 yang memiliki metode, materi dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), Kurikulum 1984 yang dikenal dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Kurikulum 1994 yang memiliki beberapa perubahan salah satunya adanya pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan, dilanjutkan ke Kurikulum 2004 yang melahirkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, dan pada tahun 2022 mulai memberlakukan Kurikulum Merdeka.

Ada begitu banyak perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Sebelum diterapkannya Kurikulum Merdeka, pada awal tahun 2020 lalu Indonesia mengalami musibah *covid-19*. Musibah tersebut berdampak pula pada sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah perubahan kurikulum yang begitu mendadak. Kurikulum tersebut adalah kurikulum darurat. Pemerintah

memberlakukan Kurikulum Darurat dengan tujuan agar proses belajar mengajar dapat terus berjalan dengan baik. Dikarenakan peraturan yang mengimbau tidak boleh adanya kerumunan, maka pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara langsung di sekolah berubah menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring. Dilansir dari laman kemdikbud.go.id, Nadiem Makarim menyatakan bahwa kurikulum darurat adalah langkah awal Kurikulum Merdeka. Pada kurikulum darurat, pemerintah menurunkan jumlah materi secara drastis agar para pendidik dan peserta didik dapat fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial atau penting.

Sesuai dengan data Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tertanggal 12 Februari 2023, sudah ada sebanyak 31,5% sekolah di Indonesia yang menggunakan kurikulum darurat. Lalu pada laman *kompas.com*, Kemendikbud Ristek melaporkan sudah ada sekita 142.000 sekolah di Indonesia yang bersedia menggunakan Kurikulum Merdeka untuk tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun ajaran 2021/2022 Kurikulum Merdeka sudah diizinkan untuk digunakan kali pertama, namun hanya untuk sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP).

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut dan sistem kemajuan pendidikan yang ada tentu tak terlepas dari adanya peran sistem pendidikan di Indonesia. Maka dengan adanya pembaruan berupa Kurikulum Merdeka menjadi sebuah gagasan yang memberikan kelonggaran kepada guru juga siswa untuk menentukan sendiri sistem pembelajaran yang akan diterapkan (Dela, dkk., 2020). Dalam perjalanan sistem pembelajaran selama ini, proses belajar mengajar dirasa sangat kaku, yang mana dalam penerapannya sebagian besar

murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan. Oleh karena itu, sistem seperti ini kebanyakan akan berkutat pada pengetahuan namun minim keterampilan. Sedangkan lingkup dalam pendidikan amatlah luas yang juga menjangkau sikap. Pada tahap ini, kemendikbudristek telah memberikan tiga pilihan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuan pendidikan. Dilihat dari *kemendikbud.go.id*, pilihan tersebut adalah Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum Darurat adalah kurikulum pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi pada kondisi khusus dan memiliki prinsip diversifikasi yang mengacu pada Kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar namun lebih disederhanakan serta diterapkan saat pembelajaran masa *covid-19*. Sedangkan Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dulunya disebut Kurikulum *Prototype* yang kemudian dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik.

Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan standarnya akan mampu digunakan untuk mengarahkan dan mencegah aktifitas yang melenceng dengan yang telah dituliskan dari kurikulum (Suwandi, 2020). Kurikulum juga memiliki fungsi sebagai aturan yang perlu dilaksanakan dalam meluruskan pelaksanaan yang kurang atau bahkan tidak sesuai dari kurikulum, serta sebagai pembangun pengalaman dan pengembangan belajar siswa (Prihatmojo dan Badawi, 2020).

Hal ini menjadikan evaluasi pada implementasi suatu kurikulum penting untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan evaluasi kurikulum ditujukan untuk mengetahui sejumlah efektivitas, relevansi, efisiensi, dan *feasibility* kurikulum dari penerapannya (Hamdi, 2020). Dengan adanya pelaksanaan kurikulum, khususnya Kurikulum Merdeka, maka siswa dan tenaga kependidikan dapat melihat hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau dipertahankan dari setiap komponen kurikulum tersebut, sehingga evaluasi ini memiliki eksistensi yang urgen untuk terus dilaksanakan (Hilabi, 2019). Secara umum, evaluasi pada kurikulum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam hal memperbaiki kurikulum. Hal itu dapat juga dikatakan bahwa seseorang bisa mengungkapkan hasil penelitiannya terhadap pelaksanaan atau proses pembelajaran dalam suatu jenjang yang dievaluasi dalam rangka perbaikan kurikulum. Standar Nasional Pendidikan (SNP) digunakan sebagai acuan peningkatan mutu pendidikan seperti halnya dalam proses pelaksanaan kurikulum ini.

Pelaksanaan evaluasi kurikulum memiliki beberapa model yang perlu disesuaikan dengan kondisi maupun kelayakan suatu lembaga pendidikan. Melalui perkembangan di Amerika, Inggris, dan Australia, terdapat tiga jenis evaluasi kurikulum yaitu yang pertama ada kategori kuantitatif yang terdiri atas *Black Box Tyler*, Teoritik Taylor dan Maguire, Pendekatan Sistem Alkin, *Countenance Stake*, dan CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Selain itu ada pula model kualitatif seperti studi kasus, iluminatif, dan responsif. Ketiga ada model-model ekonomi. Stufflebeam yang merupakan pimpinan kelompok evaluator mengembangkan konsep evaluasi yang lebih luas. Kelompok ini kadang

disebut juga dengan nama *Phi Delta Kappa* (PDK) dan model evaluasi yang dihasilkan terkadang disebut juga dengan nama model PDK atau model Stufflebeam, sang pemimpin. Walau demikian, model ini dikenal dengan nama *Context, Input, Process*, dan *Product* atau yang disingkat dengan CIPP. Singkatan itulah yang lebih banyak dikenal oleh evaluator (Hasan, 2009: 37).

Evaluasi dengan penelitian memiliki hubungan erat, karena dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan proses pengumpulan data dan beberapa metode untuk keperluan analisis data dalam pengevaluasian kurikulum. Lembaga pendidikan yang melakukan evaluasi kurikulum harus bersifat terbuka, karena dalam kajian ini pemerintah juga dapat mengetahui kebenaran penerapan kurikulum untuk mengukur dan menilai kesesuaian kurikulum yang telah digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Tsani, dkk., 2021: 20). Evaluasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Indonesia sangat perlu diadakan sebagai pedoman perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia ke depannya. Maksud dari evaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah untuk mengetahui keberhasilan program pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum Merdeka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Kurikulum Merdeka secara realitasnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum. Hal ini dikarenakan masih ada tenaga pendidik yang belum memahami betul alur Kurikulum Merdeka. Saat ini masih ada beberapa guru yang kurang memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik padahal, itu adalah konteks penting yang perlu diketahui oleh tenaga pendidik dalam menerapkan Kurikulum Merdeka

yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi. Pengetahuan awal siswa juga penting diketahui tenaga pendidik sebagai bagian dari input sebelum menjelaskan materi yang akan diberikan. Namun nyatanya, masih saja ada beberapa guru yang belum memahami bagian ini bahkan ada juga yang langsung memberikan pada materi. Kurikulum Merdeka dirancang berbasis proyek agar tenaga pendidik dapat menilai proses pembentukan karakter siswa berdasarkan enam profil Pancasila. Namun, masih banyak guru yang menutup mata pada proses yang dilalui peserta didik dan langsung menilai hasil akhir produk yang dibuat. Selain itu, saat memberikan dan menilai produk yang dibuat oleh siswa, masih banyak tenaga pendidik yang hanya memberikan satu jenis tugas, tutunan, dan rubrik penilaian yang sama untuk peserta didik tanpa memandang adanya diferensiasi pada mereka.

Pernyataan di atas merujuk pada permasalahan konteks, input, proses, dan produk dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Keempat komponen tersebut tentu perlu dievaluasi agar dapat menjadi acuan bagi tenaga pendidik atau sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Jenis evaluasi yang paling cocok digunakan adalah evaluasi model CIPP karena komponen yang dievaluasi sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan yaitu keterbatasan pemahaman tenaga pendidik mengenai konteks, input, proses, dan produk dari penerapan Kurikulum Merdeka ini. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan sebuah kajian dalam mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) di SMP Negeri 1 Seririt. Program Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt sudah berlangsung selama empat semester atau dua tahun.

SMP Negeri 1 Seririt dipilih karena sekolah ini merupakan sekolah yang mengimplemantasikan Kurikulum Merdeka pada tahap pertama, maka secara otomatis sekolah ini juga merupakan sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak. Selain itu, pada tahap pertama hanya ada tiga SMP di Buleleng yang berhasil mengikuti Program Sekolah Penggerak, di antaranya SMP Negeri 3 Singaraja, SMP Negeri 4 Sukasada, dan SMP Negeri 1 Seririt. SMP Negeri 1 Seririt memperoleh poin tertinggi se-Kabupaten Buleleng saat tes Kepala Sekolah untuk dapat mengikuti Program Sekolah Penggerak. Bukan hanya itu, SMP Negeri 1 Seririt juga sudah sering kali memberikan pengimbasan terkait Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di sekolah kepada sekolah lain. Pengimbasan ini juga tidak hanya dilaksanakan se-Kabupaten Buleleng, namun juga diberikan di Kabupaten Negara, Bangli, dan Denpasar. Bahkan bukan hanya tingkat SMP, tim dari SMP Negeri 1 Seririt dipercaya juga untuk mengimbas di tingkat SMA.

Terkait dengan itu, peneliti juga menemukan beberapa penelitian sejenis yaitu “Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) pada Mata Pelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam di MTs Plus Madinatul Muhtadi ien Ngadiluwih Kediri” oleh Elvy Mukarommah pada tahun 2022, penelitian oleh Akrimullah Mubai, dkk. pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Model CIPP dalam Evaluasi Kurikulum Pendidikan Teknik Informatika”, “Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo” oleh Siti Nur Afifah tahun 2022 serta “Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dengan Menggunakan Model CIPP” oleh Anisah Rahmiwati tahun 2022. Secara garis

besar, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan yang ada terdapat dari segi subjek dan objek. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong penelitian yang baru. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam kesempatan ini peneliti merumuskan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka dengan Model CIPP di SMPN 1 Seririt”, untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Seririt.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah yang ditemukan sesuai dengan latar belakang yang ada.

1. Perubahan kurikulum yang tergolong cepat membuat satuan pendidikan di Indonesia harus menyesuaikan diri, namun tak sedikit yang masih belum memahami betul tentang alur Kurikulum Merdeka.
2. Masih ada tenaga pendidik yang belum memahami konteks dalam pembelajaran, salah satunya mencari tahu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Padahal, Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berdiferensiasi yang menuntut tenaga pendidik memahami hal tersebut.
3. Tenaga pendidik perlu mengetahui pengetahuan awal siswa sebelum membagi siswa yang sudah paham, cukup paham, dan belum paham. Hal ini sejalan dengan alur Kurikulum Merdeka yaitu Merdeka yang diawali dengan mulai dari diri. Akan tetapi masih ada beberapa guru yang belum memahami

bagian ini bahkan ada juga guru yang langsung masuk pada materi tanpa mencari tahu pengetahuan awal siswa.

4. Kurikulum Merdeka yang berbasis proyek mengajak tenaga pendidik untuk lebih melihat bagian proses yang dilalui oleh peserta didik ketimbang hasil akhir yang dibuat. Namun, masih banyak guru yang menutup mata pada proses yang dilalui peserta didik dan langsung menilai hasil akhir produk yang dibuat.
5. Sejalan dari tujuan Kurikulum Merdeka yang meminta tenaga pendidik untuk memahami kediferensiasian siswa, tenaga pendidik diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk membuat produk hasil belajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Namun nyatanya, masih banyak tenaga pendidik yang hanya memberikan satu jenis tugas, tutunan, dan rubrik penilaian yang sama untuk peserta didiknya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut.

1. Analisis dilakukan di SMP Negeri 1 Seririt di kelas VII yang mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia fase D tahun kedua.
2. Analisis dilakukan selama dua bulan yaitu bulan April hingga Mei 2024.
3. Analisis dilakukan pada materi Buku Fiksi dan Nonfiksi.
4. Evaluasi yang dilakukan akan membahas konteks, input, proses, dan produk dari pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Kurikulum Merdeka.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, dapat disampaikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah konteks pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt?
2. Bagaimanakah input pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt?
3. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt?
4. Bagaimanakah produk pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, dapat disampaikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konteks pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt.
2. Untuk mengetahui input pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt.

4. Untuk mengetahui produk pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Seririt.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada kemudian hari dari penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang evaluasi program pembelajaran, khususnya yang berkenaan dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Guru Bahasa Indonesia

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi guru bahasa Indonesia dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
- 2) Sebagai pedoman dan pijakan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- 3) Sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran.
- 4) Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman yang akan membantu peserta didik meraih prestasi dalam belajar.

b. Manfaat bagi Peneliti Lain

- 1) Sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian berikutnya.